

## **PENGENTASAN KEMISKINAN ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN: Suatu Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara**

**Simson Tondo\*), Kismartini, Ida Hayu Dwimawanti\*\*)**

\*) Program Studi Administrasi Negara Universitas Halmahera

\*\*) Magister Ilmu Administrasi Universitas Diponegoro

Jl. Wari Raya, Tobelo Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara 97762, Indonesia

Email: simson\_tondo@yahoo.co.id

### *Abstract*

*The government's commitment to alleviate poverty today is highly important. However, the commitment must be followed by an effective policy. The Policy of Home Construction for Poor Family in the form of home renovation activity is the realization of the government's commitment of North Halmahera Regency to alleviate poverty. The problems was that the activity did not reduce poverty and some houses were improper to reside. The aim of the research was to evaluate the success of the poicy of home construction for poor people considering the indicators of William Dunn evaluation, effectiveness, sufficiency, alignment, responsiveness, and accuracy. The research used qualitative approach with the technique of purposeive to determine key informant. The evaluation results show that the policy was not successful as indicated by the presence of poverty, improper house to reside, no empowerment to the target families, and the program was not the need of the people.*

**Keywords:** *Policy Evaluation, Poverty Alleviation, Surgical Home*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang masih dihadapi bangsa Indonesia serta menjadi keprihatinan banyak pihak. Keprihatinan banyak pihak tentang kemiskinan kemudian lahirlah konsep-konsep kemiskinan yang dikatakan oleh H.M. Safi'I (2011:24) bahwa dewasa ini banyak sekali defenisi mengenai masyarakat miskin, termasuk istilah masyarakat prasejahtera atau dibawah garis kemiskinan. Namun, semua pada esensinya punya satu makna, yakni tidak mampu memenuhi kebutuhan bahkan kebutuhan hidup yang paling dasar.

Selanjutnya Soedarsono dalam Safi'I (2011:24) mengatakan kemiskinan sebagai struktur tingkat hidup yang rendah, mencapai tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibanding dengan standar hidup yang umumnya berlaku dalam masyarakat. Standar hidup yang rendah tercermin dari tingkat kesehatan, moral dan rendahnya rasa harga diri.

Untuk mengatasi kemiskinan itu sendiri, maka sudah pasti diperlukan berbagai kebijakan, perencanaan, monitoring dan evaluasi berbagai program tentang penanggulangan kemiskinan. Komitmen pemerintah untuk bisa memberdayakan

daerah-daerah otonom dan mengentaskan kemiskinan dewasa ini sangatlah bermanfaat bagi perkembangan suatu daerah, namun komitmen tersebut harus dibarengi oleh kemauan dari pemerintah daerah itu sendiri serta kebijakan yang tepat guna.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Utara adalah Pembangunan Rumah Keluarga Belum Beruntung-kegiatan Bedah Rumah yang dilaksanakan di Kecamatan Loloda Utara melalui kebijakan yang dikeluarkan pada Tanggal 23 Agustus 2011 dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor: 410/169//HU/2011 Tentang: Penetapan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Kegiatan Bedah Rumah Keluarga Miskin Secara Swakelola Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2011. (Tercantum dalam Pengantar Buku Laporan Pembangunan Rumah Keluarga Belum Beruntung (KBB) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2011).

Program bedah rumah ini yang kemudian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara menamakan Program Bedah Rumah Keluarga Belum Beruntung (KBB) yang dilaksanakan dengan tujuan mengentaskan kemiskinan melalui pemberian bantuan rumah layak huni bagi keluarga miskin (keluarga belum beruntung-KBB) dan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi

keluarga belum beruntung. (Buku Laporan Pembangunan Rumah Keluarga Belum Beruntung, hlm. 33).

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menggunakan indikator dalam menentukan kemiskinan di Halmahera Utara tahun 2011 adalah dengan kriteria keluarga yang tidak punya rumah, jenis lantai masih tanah, jenis dinding dari bambu dan jenis atap rumah dari daun sagu. (Termuat dalam Pengantar Buku Laporan Pembangunan Rumah Keluarga Belum Beruntung Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2011.)

### **Permasalahan**

Permasalahan yang terjadi dari kebijakan pembangunan rumah keluarga belum beruntung (KBB) adalah terlihat tidak ada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam enam tahun berjalannya program serta sebagian rumah sudah tidak layak huni.

Program Pembangunan Rumah Keluarga Belum Beruntung (KBB) dilaksanakan di 17 kecamatan lingkup Kabupaten Halmahera Utara secara bertahap. Kecamatan Loloda Utara menjadi pilihan penulis dalam penelitian ini dengan alasan bahwa kecamatan Loloda Utara termasuk daerah yang terisolir dan merupakan kecamatan yang ada di Kabupaten Halmahera Utara dengan tingkat keluarga miskin yang paling tinggi. (Buku Laporan KBB, hlm. 29.)

**Tabel Kemiskinan Per Kecamatan 2011**

No	Kec	Jlh De sa	Jlh Miskin		Kel.
			KK	Jiwa	
1	Kao Teluk	11	89	387	
2	Malifut	22	233	1.715	
3	Kao	14	240	1.121	
4	Kao Barat	21	221	1.006	
5	Kao Utara	12	268	1.302	
6	Tobelo Barat	5	212	989	
7	Tobelo Timur	6	253	1.170	
8	Tobelo Selatan	13	208	911	
9	Tobelo Tengah	9	103	472	
10	Tobelo	10	225	1.087	
11	Tobelo Utara	10	122	587	
12	Galela	7	114	588	
13	Galela Selatan	7	111	479	
14	Galela Barat	9	136	555	
15	Galela Utara	12	339	1.509	
<b>16</b>	<b>Loloda Utara</b>	<b>18</b>	<b>415</b>	<b>1.725</b>	
17	Loloda Kepulau an	10	279	1.244	
Jumlah		19 6	<b>3.568</b>	<b>17.927</b>	

Sumber: Buku Laporan Program KBB  
Pemda Halut 2011

### Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi keberhasilan kebijakan pembangunan rumah keluarga belum

beruntung (KBB) di Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara.

### Teori

Banyak pengertian tentang kebijakan publik. William N. Dunn (Pasolong, 2007:39) mengemukakan kebijakan publik sebagai suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Pengertian lain tentang kebijakan publik dijelaskan oleh Thomas R. Dye (Winarno, 2014:20) mengatakan bahwa kebijakan publik apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

Evaluasi secara sederhana merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah suatu program dilaksanakan sesuai apa yang diinginkan dan apabila tidak sesuai berada dalam posisi mana kita berada. Apakah kita akan menghentikan kebijakan atau memperbaikinya. Proses penyelidikan inilah titik berat evaluasi. (Moekijat, 1995:180)

Sementara Jones (Widodo, 2007:113) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan publik adalah suatu aktivitas yang dirancanag untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan yang sangat penting

dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukuran dan metode analisisnya.

Pengukuran dan penilaian evaluasi sebuah keberhasilan kebijakan memerlukan kriteria atau indikator agar pengukuran atau penilaian yang dilakukan lebih objektif. Teori yang digunakan untuk mengupas permasalahan kebijakan pembangunan rumah keluarga belum beruntung di Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara adalah teori evaluasi yang dicetuskan oleh Willyam N. Dunn (Subarsono, 2008:126)

Indikator evaluasi menurut Dunn meliputi: pertama, Efektivitas berkenan dengan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai? Dalam artian bahwa ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Kedua, Kecukupan berkenan dengan seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat menyelesaikan masalah? Artinya kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Ketiga, Pemerataan berkenaan dengan apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda? Dengan kata lain pemerataan adalah

suatu kebijakan yang didistribusikan secara adil.

Keempat Responsivitas berkenan dengan apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka? Dalam artian bagaimana respon atau tanggapan masyarakat dari suatu aktivitas kebijakan.

Kelima, Ketepatan berkenan dengan apakah hasil yang dicapai bermanfaat? Artinya bagaimana konstruksi rumah dan bahan bangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan rumah di daerah pesisir pantai.

Selanjutnya, suatu Evaluasi berhubungan erat dengan informasi mengenai manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari suatu kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik (Dunn, 2003:610).

Penelitian tentang pengentasan kemiskinan telah dilakukan beberapa peneliti. Juli Panglima Saragih, dalam penelitian dengan judul *Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta* tahun 2015 menyimpulkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta harus dilakukan secara terus menerus dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang ada guna mencari solusi strategis di masa yang akan datang dan dalam

jangka panjang. Kebijakan fiskal daerah dengan peningkatan anggaran daerah baik APBD DIY maupun kabupaten/kota di DIY, serta dana kemiskinan yang bersumber dari APBN dapat membantu masyarakat miskin yang didesain dengan program yang bersifat produktif dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan.

Selanjutnya, dalam upaya pengentasan kemiskinan di DIY perlu menempuh kebijakan antara lain *pertama*, mempertajam dan membuat prioritas-prioritas program yang nyata, setelah memetakan permasalahan kemiskinan penduduk. *Kedua*, menambah dan memfokuskan anggaran dalam APBD yang bersifat produktif untuk mendorong usaha-usaha mikro dan kecil masyarakat DIY sebagai upaya meningkatkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan. *Ketiga*, mengembangkan sektor ekonomi unggulan daerah yang sangat potensial agar dapat memberikan multiplier effect bagi ekonomi masyarakat secara keseluruhan, termasuk penduduk miskin dan berpenghasilan sangat rendah. *Empat*, pemerintah kabupaten/kota di DIY perlu terus meningkatkan koordinasi dalam kebijakan dan implementasi setiap program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat miskin, sehingga tidak terkesan tumpang tindih dan berjalan sendiri-sendiri. *Kelima*, pendekatan participatory dalam mengurangi angka kemiskinan penduduk di DIY, dapat dipertahankan dan

dikembangkan dengan memberikan keleluasan bagi masyarakat untuk mandiri

Sementara Reza Fachrudin, dalam penelitian yang termuat di Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang dengan judul *Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2015* menemukan bahwa Produk Kebijakan penanggulangan kemiskinan berupa Perda Nomor 8 Tahun 2014 tidak berhasil guna atau tidak tepat sasaran, dari segi bantuan pendidikan jumlah besaran bantuan biaya pendidikan tidak sesuai dengan bantuan pendidikan, Program bantuan kesehatan terkendala dengan prosedural penggunaan unit pelaksana teknis pelayanan kesehatan, tidak ada peminat Program pelatihan ketrampilan dan tidak ada sistem yang kuat dalam program bantuan kepada masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dengan membuat deskripsi atau lukisan secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. (Moleong, 2012:6).

Penelitian ini akan memfokuskan pada evaluasi keberhasilan kebijakan tentang pembangunan rumah keluarga belum beruntung kegiatan bedah rumah. Apakah sudah sesuai dengan tujuan program yang termuat dalam SK Bupati Halmahera Utara Nomor: 410/169//HU/2011.

Lokasi Pelaksanaan penelitian dilaksanakan di Kecamatan Loloda Utara, untuk mengkaji 'Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Keluarga Belum Beruntung Kegiatan Bedah Rumah' yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2011.

Selanjutnya menurut Lofland (Moleong, 2012:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah *Kata-kata*, dan *Tindakan*, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Berkaitan dengan itu maka Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diambil meliputi kata-kata dan tindakan; sumber tertulis; dan foto.

Dalam melakukan pemilihan informan untuk mendukung hasil penelitian, maka pemilihan *key informan* dilakukan dengan teknik *purposive* yaitu memilih orang yang benar-benar mengetahui dan menguasai serta terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Informan adalah orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya (Idrus, 2009:91).

Key infroman dalam penelitian ini adalah mantan bupati Halmahera Utara (pembuat kebijakan), masyarakat Kecamatan Loloda Utara. Informan lain akan ditentukan dengan menggunakan teknik *snowball*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dari informan selanjutnya akan dianalisis secara sistematis dengan melakukan tiga langkah secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Evaluasi Keberhasilan Kebijakan Pembangunan Rumah Keluarga Belum Beruntung (KBB)**

Pengentasan kemiskinan merupakan tanggungjawab bersama baik pemerintah maupun swasta. Berbagai penanganan kemiskinan telah di tempuh oleh pemerintah lewat kebijakan, namun setiap kebijakan haruslah tepat sasaran. Hadirnya kebijakan pembangunan rumah keluarga belum beruntung dengan harapan bisa mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Loloda Utada Kabupaten Halmahera Utara.

Seiring dengan berjalannya kebijakan penanganan kemiskinan, maka sudah tentu dibutuhkan suatu evaluasi untuk diberikan umpan balik agar penanganan bisa lebih baik kedepan. Dalam penelitian ini indikator evaluasi Dunn menjadi pisau analisis untuk

mengupas permasalahan kebijakan pembangunan rumah keluarga belum beruntung di Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, Indikator tersebut meliputi:

### **Efektivitas**

Efektivitas dalam sebuah evaluasi kebijakan merupakan hal yang penting untuk mengetahui hasil sebuah kebijakan. Wahab, (2011:27) misalnya mengatakan bahwa untuk memahami makna kebijakan adalah dengan melihatnya dari sudut akhirnya, yaitu, dalam artian apa yang senyatanya telah dicapai.

Hasil yang diinginkan dalam kebijakan pembangunan rumah keluarga belum beruntung adalah mengentaskan kemiskinan atau menekan angka kemiskinan dan memberikan rumah layak huni di kecamatan Loloda Utara.

Kebijakan pembangunan rumah keluarga belum beruntung di Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara dinilai tidak sesuai yang diharapkan dalam tujuan kebijakan, terlihat dari tingkat kemiskinan, kehidupan keluarga sasaran yang merasa tidak ada peningkatan kesejahteraan pasca dilaksanakannya kebijakan dan rumah yang sudah rusak serta tidak layak huni.

Fair Rato Ngekomo (Camat Loloda Utara) membenarkan bahwa program bedah rumah yang kurang lebih enam tahun berjalan belum mampu mengurangi kemiskinan di kecamatan Loloda Utara. (wawancara 5 Januari 2017).

**Tabel Jumlah Kemiskinan di Kecamatan Loloda Utara Tahun 2014**

Tahun	Kemiskinan (ribu jiwa)
2011	1.725
2012	1.245
2013	1.336
2014	1.574

*Sumber: Kantor Camat Loloda Utara-Loloda Utara 2016 (Update Terakhir)*

Data di atas menunjukkan bahwa tahun 2014 (data terakhir) jumlah kemiskinan Kecamatan Loloda Utara 1.574 naik dari tahun 2013 1.336, setelah sempat turun dari tahun 2011 1.725 ke tahun 2012 1.245. Dengan demikian, tren kemiskinan tahun 2011 sejak ada program bedah rumah tidak mengurangi angka kemiskinan di Loloda Utara.

Salah satu keinginan dari kebijakan pembangunan rumah keluarga belum beruntung adalah pemberian rumah layak huni. Robli Waigama (Keluarga sasaran desa Igo) mengatakan:

‘Katanya rumah layak huni, padahal lihat sendiri keberadaan rumah sekarang dari dinding dan atapnya sudah rusak, tidak tahu kenapa cepat rusak cuma yang pasti kayu yang dipakai mudah rusak dan dindingnya dari triplek’  
(wawancara 27 Desember 2016)

**Gambar Rumah Tidak Layak Huni**



## **Kecukupan**

Kecukupan dalam suatu evaluasi kebijakan sangatlah penting dalam rangka menilai seberapa jauh hasil yang dicapai dapat memecahkan masalah. Dunn (Subarsono, 2008:126) misalnya mengatakan bahwa kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh out-put dapat memecahkan masalah.

Evaluasi kebijakan pembangunan rumah keluarga belum beruntung berkaitan dengan indikator kecukupan dapat dilihat dari kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga sasaran. Kebijakan pembangunan rumah keluarga belum beruntung di Kecamatan Loloda Utara dapat dikatakan tidak mensejahterakan dan memberdayakan keluarga sasaran.

Bahrudin Laabu (keluarga sasaran) misalnya mengatakan bahwa:

*‘Saya punya kehidupan biasa-biasa saja sama seperti dulu sebelum dapat rumah ini. Ini kan cuma rumah jadi saya rasa tidak diberdayakan, ya seperti ini saja. Saya punya pendapatan keluarga juga biasa saja, kami cuma berharap di kopra (hasil kebun kelapa)’* (wawancara 10 Januari 2017).

## **Pemerataan**

Menurut Dunn (2003:430) indikator kesamaan erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Pemerataan dalam kebijakan pembangunan rumah keluarga belum beruntung dalam artian

kebijakan didistribusikan adil kepada keluarga sasaran.

Dalam indikator ini para keluarga sasaran terlihat tidak setuju bahwa kebijakan pembangunan rumah keluarga belum beruntung di Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara telah secara adil dilaksanakan, seperti masih terdapat keluarga sasaran yang mestinya mendapat belas kasihan tetapi tidak mendapatkannya, justru sebaliknya terdapat keluarga sasaran yang seharusnya tidak berhak untuk mendapatkan belas kasihan tetapi mendapatkannya. Dalam kebijakan pembangunan rumah keluarga belum beruntung yang berhak mendapatkan rumah adalah keluarga yang benar-benar membutuhkan yakni keluarga yang kurang mampu.

Terkait dengan keadilan dalam program, ternyata ada masalah yang kemudian dikeluhkan oleh Ilham Kadato, bahwa:

*‘Jadi waktu itu saya heran kenapa saya tidak dapat, saya rasa tidak adil, tetapi mau bagaimana? Semua mereka (pemerintah daerah) yang tentukan’* (wawancara 28 Desember 2016).

## **Rumah yang Tidak dibedah di Desa Supu**





Ketidakadilan dalam kebijakan pembangunan rumah keluarga belum beruntung di kecamatan Loloda Utara juga ditemukan dalam kebijakan ini yang kemudian disampaikan oleh Dahlan Bangijo (keluarga sasaran), bahwa:

*'Ini rumah saya sudah bongkar dan buat rumah baru dan yang besar sedikit, karena rumah yang ada cuma kecil. Jadi saya tidak tahu tiba-tiba saya ada nama waktu itu dalam daftar bedah rumah, jadi saya terima saja'* (wawancara 28 Desember 2016)

### **Rumah Yang Telah di Rubah di Desa Supu**



### **Responsivitas**

Menurut Dunn (Subarsono, 2008:126) suatu hasil kebijakan baik jika ada keterlibatan masyarakat dalam kebijakan tersebut. Responsivitas dalam kebijakan pembangunan rumah keluarga belum beruntung melihat pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Loloda Utara dan peran serta masyarakat dalam program.

Kebijakan pembangunan rumah keluarga belum beruntung di Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara dapat dinilai bukan menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka pengentasan

kemiskinan dan kurangnya peran atau partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

Hendrik Karianga (Tokoh Masyarakat) misalnya mengatakan:

*'Kalau kita mau jujur sebenarnya bedah rumah bukan menjadi kebutuhan masyarakat Loloda Utara, karena kita masyarakat Loloda Utara lebih butuh infrastruktur jalan, dermaga dan listrik. Karena, kalau rumah hanya sebagian orang yang menikmati. Kalau dibilang bedah rumah untuk mengentaskan kemiskinan, menurut saya tidak mengentaskan kemiskinan.'* (wawancara 29 Desember 2016).

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota DPRD Halmahera Utara Fauji Daga, bahwa:

*'Apakah bedah rumah menjadi suatu kebutuhan masyarakat Loloda Utara? Tentunya tidak, bisa ditanya ke masyarakat Loloda Utara, pasti semua yang mereka butuhkan adalah infrastruktur seperti jalan, jembatan, dermaga dan satu lagi yaitu listrik. Kalau ini hadir di Loloda Utara, maka dengan sendirinya ekonomi masyarakat akan tumbuh. Karena, sampai sekarang mereka punya usaha pertanian tidak bisa dipasarkan'* (wawancara 12 Januari 2017)

### **Ketepatan**

Menurut Dunn (Subarsono, 2008:45) Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut

substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Selanjutnya, ketepatan dalam kebijakan pembangunan rumah keluarga belum beruntung menunjuk pada konstruksi rumah dan bahan bangunan yang layak nya pembangunan rumah di daerah pesisir pantai, karena kecamatan Loloda merupakan daerah pesisir pantai yang itu rumah rentang rusak.

Kebijakan pembangunan rumah keluarga belum beruntung di Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara dinilai tidak tepat dalam pembangunan rumah dimana konstruksi rumah yang tidak sesuai keinginan masyarakat dan juga bahan bangunan seperti dinding dari triplek dan kayu yang tidak kuat membuat bangunan tidak bertahan lama.

## **SIMPULAN**

Kebijakan pembangunan rumah keluarga belum beruntung di Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara tidak sesuai yang diharapkan dalam tujuan kebijakan, terlihat dari tidak ada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga sasaran pasca dilaksanakannya kebijakan, serta sebagian rumah sudah tidak layak untuk dihuni.

Penentuan keluarga sasaran dalam kebijakan pembangunan rumah keluarga belum beruntung di Kecamatan Loloda Utara tidak dilakukan secara adil yakni ada keluarga yang mestinya mendapat belas

kasihan, tetapi tidak dapat dan sebaliknya, ada keluarga sasaran mestinya tidak mendapat belas kasihan tetapi justru mendapat belas kasihan. Selain itu, pendataan kemiskinan untuk penentuan keluarga sasaran tidak dilakukan dengan transparan dan tidak melibatkan masyarakat.

Hadirnya kebijakan pembangunan rumah keluarga belum beruntung di Kecamatan Loloda Utara bukan menjadi kebutuhan masyarakat Loloda Utara dan juga tidak mendapat respon atau tanggapan baik oleh masyarakat bahkan tidak ada partisipasi masyarakat dalam kebijakan tersebut. Selain itu, bahan bangunan dalam pembangunan rumah keluarga belum beruntung tidak berkualitas yang kemudian keberadaan rumah sangat memprihatinkan dan tidak layak huni.

## **SARAN**

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Loloda Utara melalui kebijakan Pembangunan Rumah Keluarga Belum Beruntung maka, disarankan Pemerintah Daerah melakukan beberapa hal berikut ini:

- a. Pengorganisasian, pelaksanaan dan pembiayaan program dalam kebijakan pembangunan rumah keluarga belum beruntung harus dirancang dengan baik yakni berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Tenaga kerja dalam kebijakan pembangunan rumah keluarga belum

beruntung harus mempunyai keahlian dalam pembuatan rumah yakni tukang kayu dan tukang batu.

- c. Kebijakan pembangunan rumah keluarga belum beruntung harus dirancang dengan melibatkan semua pihak termasuk DPRD sebagai mitra kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Moekijat. 1995. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Bandung. Mandar Maju.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik; Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung. Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Pasolong, Herbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung Alfabeta.
- Fachrudin, Reza. 2015. *Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Balikpapan*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang. Nomor 02, Volume 04.
- Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Safi'i, H.M. 2011. *Ampih Miskin Model Kebijakan Penuntasan Kemiskinan Dalam Perspektif Teori dan Praktek*. Kandangan. Averroes Pres.
- Saragih, P. Juli. 2015. *Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, TRANSPARANSI-Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. nomor 02. Volume/edisi VII.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta. Center Of Academic Publishing Service.
- Wahab, Solichin. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang. UMM Press.
- Widodo. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang. Bayumedia Publising.